

**ROLE OF AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) INDONESIA IN PROVIDING
ASSISTANCE TO VICTIMS OF CONFLICT IN SYRIA
IN 2015-2020**

**Author : Ali Syahbansa
(email : alisyahban6@gmail.com)
Pembimbing : Drs. M.Saeri M.Hum
Bibliografi : 20 Jurnal, 17 Buku, 33 Websites**

Abstract

The purpose of this research is to see how the role played by Aksi Cepat Tanggap (ACT) of Indonesia in providing assistance to victims of conflict in Syria and what ACT has provided to help the humanitarian crisis that occurred. The humanitarian crisis that occurred in Syria, has had fatal consequences for various state actors or what is commonly called Non-Governmental Organizations (NGOs), one of which is ACT Indonesia. This study uses a pluralism perspective. Pluralists believe that a successful country is the only actor in the international world. This research is also guided by the theory of Transnational Activism and the concept of the Transnational Advocacy Network. The method used is a qualitative method. Data interview techniques and literature study from several journals, books, documents and websites.

The research shows ACT's ability to build international networks such as collaborating with NGOs and local organizations so that ACT is able to play a role in providing humanitarian assistance to the country it is aiming for, in this case the Syrian state. Then ACT Indonesia took action against the victims of the victims by executing the programs that had been made and explaining something related to ACT Indonesia to help victims of conflict in Syria.

The results of this study concluded that ACT Indonesia has the ability to build international networks so that ACT is able to provide assistance to victims of conflict in Syria.

Keywords: ACT Indonesia, Conflict, Humanitarian Crisis, Syria, NGO, Transnational, Advocacy

PENDAHULUAN

Konflik adalah keadaan masyarakat yang mengalami kehancuran keteraturan sosial yang dimulai dari individu atau kelompok yang tidak setuju dengan pendapat dan pihak lainnya.¹ Sehingga mendorong terjadinya perubahan sikap, perilaku, dan tindakan atas dasar ketidaksetujuannya. Konflik sering terjadi akibat permasalahan antara 2 pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pandangan dan pendapat yang dimana menurut masing-masing dari mereka adalah yang paling benar.

Suriah merupakan sebuah negara yang memiliki nama asli *Syiria*, terletak di Benua Asia tepatnya di Asia Barat atau yang biasanya dikenal dengan kawasan Timur Tengah. Secara geografis, Suriah berbatasan langsung dengan negara Turki disebelah utaranya, kemudian berbatasan dengan negara Yordania disebelah selatan dan berbatasan dengan negara Irak disebelah timurnya. Sedangkan disebelah baratnya, Suriah berbatasan dengan Laut Tengah. Ibukota negara Suriah adalah Damaskus.² Saat ini negara Suriah sedang dalam keadaan yang dilanda konflik perang saudara yang diakibatkan oleh permasalahan internal dan ditambah lagi intervensi dari luar Suriah sendiri³. Suriah saat ini menjadi lokasi konflik senjata

antara kelompok pemberontak anti pemerintahan Bashar Al-Assad atau yang disebut dengan *Free Syrian Army (FSA)*⁴ dengan kelompok pendukung pemerintah Bashar Al-Assad atau yang disebut dengan *Syrian Arab Army (SAA)*⁵, hal ini membuat Suriah menjadi negara yang berstatus tidak aman.

Menurut *the Syrian Center for Policy Research*,⁶ jumlah korban tewas sejak bulan Februari tahun 2016 berjumlah sekitar 470.000 orang. *The UN Office Humanitarian Affairs*⁷, mengungkapkan semakin meningkatnya serangan telah mengakibatkan krisis kemanusiaan di Suriah, sekitar 6,1 juta orang harus kehilangan tempat tinggal dan 4,8 juta orang mengungsi ke luar negeri. Setidaknya satu juta orang terpaksa harus tinggal di lokasi yang terkepung angkatan bersenjata dan sulit untuk mendapatkan pertolongan kemanusiaan.

Menurut data yang didapat dari PBB, hampir 5,6 juta orang yang kebanyakan wanita dan anak-anak telah meninggalkan Suriah⁸. Tetangga Suriah yakni negara Libanon, Yordania dan Turki telah berjuang untuk mengatasi salah satu eksodus pengungsi terbesar dalam sejarah baru-baru ini. Sekitar 10 persen dari total pengungsi Suriah telah mencari suaka dan perlindungan di Eropa. Sebanyak 6,1 juta orang lainnya

¹ Pengertian Konflik, faktor dan Bentuk lengkap. Diakses dari <http://dosensosiologi.com/pengertian-konflik-faktor-dan-bentuknya-lengkap/> pada 25 Februari 2020.

² Profil Negara Suriah, diakses dari <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-suriah-syria/> pada tanggal 25 Februari 2020

³ Musabab Perang Suriah, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43403254> pada tanggal 26 Februari 2020.

⁴ Enam hal yang mengubah perang Suriah, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39276182> pada tanggal 19 Agustus 2020.

⁵ Ibid.

⁶ the Syrian Center for Policy Research (SCPR) adalah wadah pemikir independen, non-pemerintah, nirlaba yang berbasis di Suriah.

⁷ the UN Office Humanitarian Affairs adalah Kantor koordinasi urusan kemanusiaan PBB.

⁸ Ibid.

mengungsi dari dalam Suriah. PBB memperkirakan akan membutuhkan US\$3,5 milyar untuk membantu 13,1 juta orang yang memerlukan bantuan kemanusiaan di Suriah pada tahun 2018⁹. Sekitar 70 persen penduduk hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, lalu sekitar enam juta orang menghadapi kerawanan pangan akut di tengah kemiskinan dan kenaikan harga. Di beberapa daerah di Suriah, banyak orang yang menghabiskan 15-20 persen pendapatan mereka hanya untuk mendapatkan akses terhadap air minum.¹⁰

KERANGKA TEORI PERSPEKTIF PLURALISME

Penulis menggunakan perspektif Pluralisme dalam penyusunan penelitian ini, dimana menurut Bull, Pluralisme adalah suatu konsep didalam masyarakat internasional dimana negara telah menyepakati suatu tujuan seperti ketentuan untuk menghargai kedaulatan suatu negara, dan persamaan kedaulatan negara didunia¹¹. Pada dasarnya hubungan internasional merupakan interaksi antar negara, namun sekarang pada kenyataannya Hubungan Internasional berkembang dan tidak hanya fokus pada hubungan antar negara tetapi adapula aktor non negara.

⁹ WFP. 2015. Central African Republic: WFP Country Brief. Diakses melalui <http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp272236.pdf> pada tanggal 16 Agustus 2020.

¹⁰ Awal Mula Konflik Suriah, diakses dari <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-awal-mula-konflik-suriah-bagaimana-konflik-panjang-dan-berdarah-bisa-terjadi/> pada tanggal 26 Februari 2020.

¹¹ William, Clapton. 2011. "Pluralism in International Society". Australia University Of New South Wales,. Hal 4.

Pluralisme beranggapan bahwa Hubungan Internasional tidak hanya hubungan antar negara saja, tetapi juga hubungan antar individu dan kelompok termasuk di dalamnya *societal*.

TEORI TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK

Menurut E. Keck dan Kathryn Sikkink, jaringan advokasi transnasional merupakan jaringan aktor-aktor internasional yang bekerja dalam sebuah isu, berkarakteristik secara sukarela, respirokal (timbang balik) dan horizontal dalam pertukaran informasi dan tidak mengenal batas negara.¹² Isu-isu yang di advokasi oleh aktor TAN jika dilihat dari sejarahnya berawal dari isu-isu seperti *antislavery movement* dan kampanye hak pilih perempuan kemudian isu-isu kontemporer seperti *human rights, environment, women's right*, isu kesehatan dan sebagainya.¹³

Jaringan advokasi transnasional ini sendiri terdapat tujuh aktor utama yaitu NGOs yang berskala domestic maupun internasional, *local social movements*, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari organisasi regional dan intergovernmental, serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan. Tidak semua aktor ini dibutuhkan agar berjalannya advokasi, dengan beberapa aktor saja, jaringan advokasi tetap bisa berjalan. Organisasi non pemerintah internasional maupun domestik memainkan peran sentral di

¹² Alya Nur Sabrina., " Peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam menanggulangi korban konflik di Gaza, Palestina", Skripsi S1 Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNRI, 2019, hlm. 17.

¹³ Ibid.

sebagian besar jaringan advokasi karena NGO memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi dan melobi untuk membuat perubahan kebijakan.¹⁴

Jaringan advokasi transnasional akan muncul diisu-isu dimana isu tersebut memiliki beberapa kondisi, seperti:

1. Pemerintah dan kelompok lokal tidak efektif untuk menyelesaikan sebuah konflik atau permasalahan yang diakibatkan oleh saluran atau struktur penghubung antara pemerintah dan kelompok lokal terputus atau terhambat. Kondisi ini memunculkan “*boomerang pattern*”.
2. Para aktivis percaya bahwa jaringan akan memajukan misi-misi dan kampanye-kampanye mereka serta mempromosikannya.
3. Konferensi internasional dan berbagai bentuk lain interaksi internasional menciptakan arena atau wadah untuk membentuk dan menguatkan jaringan.¹⁵

Target kegiatan TAN ini adalah mengubah perilaku negara, terkait kebijakan ataupun perilaku negara dalam suatu isu tertentu. *Transnational Advocacy Network* banyak menghubungkan aktivis di negara maju dengan negara lain ataupun di negara berkembang. Ketika kelompok lokal tidak dapat mencapai target, mereka akan mencari dukungan dari organisasi atau kelompok internasional untuk menekan negara dari luar. Inilah “*boomerang pattern*” dimana target kegiatan mereka adalah mengubah perilaku negara.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

TAN tidak memiliki *power* yang kuat dalam artian tradisional. Mereka menggunakan kekuatan informasi dalam pelaksanaan advokasi. Dalam pelaksanaannya, TAN menggunakan empat taktik, yaitu:¹⁶

1. *Information Politics*, kemampuan untuk memberikan informasi politik yang cepat dan terpercaya ke tempat yang memiliki pengaruh terkuat.
2. *Symbolic Politics*, kemampuan untuk menyerukan aksi meskipun target atau sasarannya jauh.
3. *Leverage Politics*, kemampuan memanggil aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi situasi dimana untuk membantu aktor yang lebih lemah karena tidak memiliki pengaruh sama sekali.
4. *Accountability Politics*, usaha untuk membantu aktor yang lebih kuat untuk bertindak dalam kebijakan yang mereka dukung.

PEMBAHASAN

Kemampuan ACT Membangun Jaringan Internasional

A. Upaya Mengatur Kehadiran ACT di Daerah Krisis Kemanusiaan

Bagi sebuah organisasi kemanusiaan, mengatur kehadiran di wilayah krisis kemanusiaan merupakan hal yang sangat penting. Terlebih dengan kelebihan yang dimiliki oleh ACT sebagai sebuah

¹⁶ Ibid.

NGO yang tidak terhambat birokrasi seperti halnya negara mendukung ACT untuk hadir lebih cepat di wilayah krisis kemanusiaan. Secara umum upaya penyaluran bantuan ACT dilakukan seperti yang dijelaskan diatas, namun terdapat perbedaan terkait akses kemanusiaan. Dalam upaya mengatur kehadiran di wilayah krisis kemanusiaan akibat konflik atau perang ACT memiliki tantangan dalam mendapatkan akses kemanusiaan. Disinilah ACT memanfaatkan mitra yang ACT miliki untuk membantu mendapatkan akses kemanusiaan atau membantu mendistribusikan sebagai representatif dari ACT. Namun, di wilayah krisis kemanusiaan akibat bencana alam upaya mengatur kehadiran ACT di wilayah krisis kemanusiaan akibat bencana alam memiliki cara yang berbeda. Mengatur kehadiran di wilayah krisis kemanusiaan akibat bencana alam cenderung lebih mudah dibanding dengan mengatur kehadiran krisis kemanusiaan akibat konflik atau perang.

B. Upaya Negosiasi ke Penduduk Sipil

Negosiasi yang dilakukan oleh ACT diberbagai wilayah krisis kemanusiaan dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda hal ini tentu saja karena setiap wilayah memiliki aturannya masing-masing. Namun, yang jelas ada bantuan dari mitra lokal ACT dalam proses negosiasi tersebut¹⁷. Selain itu melalui mitra lokalnya, ACT juga biasanya mendapatkan surat undangan hadir di wilayah krisis kemanusiaan. Surat

undangan dari NGO inilah yang digunakan oleh ACT untuk dapat memasuki wilayah krisis kemanusiaan yang terbatas akses masuknya. Seperti halnya yang pada saat ACT menyalurkan bantuan ke Suriah, ACT dapat memasuki wilayah Suriah dengan adanya surat undangan dari IHH Turki. ACT bersama NGO-NGO lain yang juga di undang oleh IHH bersama-sama menyalurkan bantuan ke Aleppo. Proses negosiasi, ACT menekankan pada tujuan kemanusiaan atau khususnya pada prinsip kemanusiaan untuk dapat mendapatkan ruang atau akses kemanusiaan sehingga ACT dapat menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang terdampak krisis kemanusiaan. Penekanan ini dilakukan oleh ACT dengan harapan bahwa kemanusiaan merupakan kepentingan bersama. Oleh karena itu dengan gagasan bersama yang mana kemanusiaan menjadi kepentingan bersama maka pemegang otoritas akan memberikan akses kemanusiaan kepada ACT.

C. Upaya Penghormatan terhadap Aturan Hukum dan Norma Internasional yang berlaku

Hukum dan norma-norma internasional merupakan acuan yang dipakai dalam aksi kemanusiaan. Semua aktor kemanusiaan harus berpedoman terhadap hukum dan norma kemanusiaan internasional dalam menjalankan aktivitas kemanusiaannya, termasuk diplomasi kemanusiaan. Dalam diplomasi kemanusiaan, diplomasi dilakukan untuk mendapatkan akses terhadap masyarakat yang membutuhkan

¹⁷ Ibid.

bantuan dan perlindungan. Usaha untuk mendapatkan akses penyaluran bantuan kemanusiaan dapat dilakukan dengan berpedoman pada Hukum Humaniter Internasional dan norma kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional secara resmi memuat pengaturan bahwa negara wajib membuka akses penyaluran bantuan dari organisasi kemanusiaan yang imparisial ketika sebuah negara tidak dapat atau tidak ingin menyediakan bantuan kebutuhan dasar. Konvensi Jenewa IV merupakan konvensi yang paling relevan mengenai akses bantuan kepada warga sipil, dimana konvensi ini mewajibkan negara untuk 'mengizinkan akses masuk semua pengiriman bantuan baik pasokan medis serta makanan dan pakaian untuk anak-anak dan wanita hamil.

D. Upaya Melakukan Advokasi di Berbagai Tingkatan

Advokasi yang dilakukan oleh ACT sendiri umumnya dilakukan melalui aksi kemanusiaan secara langsung dan melalui media. Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT yakni seperti aksi kemanusiaan berbentuk unjuk rasa dan kampanye. Meskipun tidak dapat dipungkiri tujuan adanya kampanye ini lebih kepada usaha ACT mengumpulkan donasi untuk diberikan sebagai bantuan. Namun, dukungan dari masyarakat umum sangat diperlukan mengingat krisis kemanusiaan yang terjadi membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Penekanan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh ACT dalam melakukan advokasi. Segala bentuk advokasi yang dilakukan oleh

ACT dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bahwa orang-orang yang terkena dampak krisis kemanusiaan dan membutuhkan pertolongan. Selain itu, advokasi ini juga dilakukan untuk mendesak negara lain untuk bertindak. Melalui aksi langsung, kampanye maupun pers rilis serta berbagai konferensi pers yang dilakuka, ACT juga mendorong pemerintah Indonesia untuk menanggapi dan bertindak untuk membantu krisis kemanusiaan yang terjadi. Melalui media, ACT dapat mengumpulkan dukungan publik dimana dukungan publik ini dapat menekan aktor negara bertindak membantu krisis kemanusiaan yang terjadi.

Upaya ACT Indonesia sebagai subjek TAN

Hubungan antar negara menjadi bersifat lintas batas dan terbuka lebar dalam gerakan transnasional. Gerakan yang lintas batas negara ini memungkinkan gerak aktor menjadi lebih luas, karena gerak mereka tidak dibatasi oleh batasan teritori tertentu. Sistem ini kemudian memunculkan berbagai aktor-aktor non negara seperti NGO (Non Government Organization) dengan berbagai agenda advokasi dan memiliki pengaruh yang cukup kuat di ranahnya. Dalam konsep ini, NGO berpeluang untuk berperan bahkan mempengaruhi kebijakan aktor negara. Hal ini mengakibatkan perkembangan yang pesat terhadap NGO dan banyak melahirkan berbagai macam NGO di berbagai ruang lingkup seperti Hak Asasi Manusia, kesehatan, lingkungan, pendidikan dan lainnya. dalah aktor vokal dengan berbagai agenda advokasi terhadap isu

yang dilakukannya. *Dikutip dari penelitian Spar dan La Mure*, NGO bekerja secara independen untuk mencapai tujuannya¹⁸. Melalui berbagai media, NGO melakukan advokasi lintas batas negara untuk memperjuangkan tujuan mereka. Kampanye merupakan salah satu cara rangkaian advokasi yang banyak digunakan dan populer di kalangan berbagai NGO dikarenakan kampanye merupakan metode yang cukup efektif.

ACT Indonesia merupakan salah satu NGO global independen yang memfokuskan kegiatannya pada advokasi isu kemanusiaan melalui kampanye. Dalam melakukan misinya yang berfokus pada isu kemanusiaan ACT Indonesia melakukan kampanye untuk menyuarakan perdamaian, meningkatkan Kesadaran masyarakat akan terjadinya isu kemanusiaan di Palestina dan juga mendorong pemerintah untuk lebih aktif lagi dalam isu Palestina ini dan agar Indonesia bisa menjadi negara-tangan diatas"

A. Taktik Advokasi

Sebuah kegiatan memerlukan strategi atau taktik yang digunakan agar apainya tujuan yang diharapkan. Menurut Margaret E. Keck and Kathrym Sikk ada beberapa taktik yang bisa digunakan untuk melakukan advokasi yaitu, *Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics dan Accountability Politics*.¹⁹ Dalam menjalankan misinya,

ACT Indonesia menggunakan taktik tersebut dalam advokasinya.

Information Politics, yaitu kemampuan memberikan informasi. ACT Indonesia menggunakan kekuatan media sosial Instagram, twitter, youtube, facebook dan juga website resmi untuk menyebarkan informasi advokasinya sehingga publik pun terlibat dalam isu-isu kemanusiaan agar mereka menjadi lebih sadar dan peduli terhadap isu tersebut serta menyucikan perdamaian. Hal ini juga untuk menggalang donasi bagi keselamatan rakyat sipil yang sedang menghadapi krisis kemanusiaan. Dalam pemberian informasi, ACT memberikan informasinya secara apa adanya dan *se-real* mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi di Suriah. Hal ini mempermudah masyarakat untuk mengetahui apa saja yang terjadi di lokasi dan dapat lebih menyadarkan masyarakat akan terjadinya isu krisis kemanusiaan di Suriah. Dalam dunia kemanusiaan, kesadaran dan kepedulian merupakan hal yang paling mendasar dan penting untuk dilakukan. Karena jika masyarakat sudah menyadari terhadap apa yang terjadi di lokasi, maka masyarakat pun akan tergerak untuk melakukan donasi ataupun melakukan aksi solidaritas.

Symbolic politics, yaitu kemampuan untuk menyerukan aksi meski target atau sasarannya jauh biasanya lewat gambar-gambar atau simbol. ACT Indonesia adalah NGO yang aktif dalam melakukan menyerukan kampanye perdamaian. Taktik ini nilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan terjadinya kemanusiaan dan juga sebagai upaya untuk mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam bertindak. Salah satunya ACT Indonesia

¹⁸ Puti Paramasweri, "Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi" *Ingenational Relations Unida Gontor*. Vol.2 No.2 Agustus 2016. Hal 211

¹⁹ Loc.cit 16

pemah hadir dalam aksi solidaritas di Istanbul, Turki untuk menyuarakan dukungan terhadap Suriah.²⁰ Selain langsung turun ke jalan, ACT Indonesia lebih sering menyerukan pesan-pesan perdamaian melalui poster-poster ataupun gambar-gambar. Beberapa diantaranya ialah kampanye "Selamatkan Suriah!" dengan tagar #LetsSaveSyria. Kampanye ini dimulai sejak tahun 2011 dan masih berlanjut hingga sekarang. Kampanye ini dilakukan ACT Indonesia bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih sadar dan peduli terhadap nasib penduduk Suriah serta untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berdonasi.

Leverage Politics ialah kemampuan memanggil aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi kondisi. ACT Indonesia selalu aktif mendesak pemerintah untuk bergerak dalam isu ini. ACT Indonesia juga aktif dalam menyampaikan keluhan-keluhan yang dialami terkait pengiriman bantuan kemanusiaan dalam bentuk barang. Penyampaian keluhan ini mendatangkan respon pemerintah dan mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pengiriman bantuan kemanusiaan yang pastinya akan berdampak besar terhadap korban-korban krisis kemanusiaan.

Accountability politics ialah usaha untuk membantu aktor yang lebih kuat. ACT Indonesia dapat dikatakan sebagai bantuan terhadap pemerintah Indonesia maupun di internasional lainnya dalam hal menangani isu kemanusiaan. Contohnya ketika ACT memberikan bantuan kepada korban konflik di Suriah,

²⁰ Wawancara bersama kak mimi, selaku Staff Act Riau.

maka secara tidak langsung ACT akan mengharumkan nama negara Indonesia di mata dunia.. ACT Indonesia yang merupakan NGO independen, karena donasi yang dikumpulkan merupakan dari civil society memiliki keleluasaan yang lebih dan fleksibel. Kehadiran ACT Indonesia dan NGO pun pasti sangat membantu disaat situasi seperti ini.

Selain tu, di sisi pemerintah Indonesia juga dibidang dapat terbantu. Meskipun pemerintah Indonesia sudah sangat aktif, namun tetap saja ada berbagai hambatan yang dialami seperti kerumitan birokrasi. Hambatan-hambatan ini membuat ACT Indonesia untuk membentuk jaringan kemitraan dari berbagai negara.

Jaringan Kemitraan ACT Indonesia

Dalam situasi tak menentu di Suriah, ACT Indonesia berprinsip bagaimana bantuan cepat masuk dan diterima oleh warga Suriah yang sangat membutuhkan keperluan-keperluan yang bersifat darurat. Penyaluran bantuan untuk warga di Suriah bukanlah hal yang mudah. Beberapa NGO terhalang menyalurkan bantuan secara langsung untuk para korban krisis kemanusiaan di Suriah. ACT Indonesia dalam menjalankan misinya tidak sendiri. ACT Indonesia memiliki jaringan kemitraan dengan banyak mitra-iitra dari berbagai NGO-NGO lain, perusahaan, media dan bahkan pemerintah, baik itu be ia maupun luar Indonesia. ACT Indonesia pun membentuk relawan *SOS Syiria* agar bantuan-bantuan dapat tersalurkan.

Dalam hubungan internasional, jaringan antar aktor saling

mempengaruhi. Pengaruh jaringan kerjasarna inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa ACT Indonesia bisa menyalurkan bantuan dan menjadi pihak yang lebih duluan dari pada pemerintah Indonesia dalam hal respon menyalurkan bantuan dan menjadikan ACT Indonesia seperti amnunisi tambahan bagi pemerintah dalam usaha membantuk kemanusiaan karena sulitnya bantuan tersebut untuk masuk.

Kerja sama ini membuat ACT Indonesia memiliki jalur-jalur khusus yang tidak dimiliki oleh pemerintah dan memungkinkan ACT Indonesia untuk terjun langsung ke lokasi. Tanpa jalur-jalur khusus tersebut, program ACT akan sulit untuk diimplementasikan. Namun, penulis tidak dapat menjelaskan kerjasarna yang dijalin dengan siapa saja dikarenakan ACT Indonesia memiliki perjanjian dengan mitra-mitranya untuk tidak dipublikasikan kerja sama tersebut atas alasan keamanan.

Kerjasama yang dilakukan ACT Indonesia dengan NGO-NGO lain bukan hanya semata-mnata untuk membantu negara yang membutuhkan bantuan. Kerjasama yang dijalin ini juga untuk misi membawa nama Indonesia di mata nternasional. Dengan kerja sama ini, ACT Indonesia berharap nama Indonesia akan lebih dikenal dan jika terjadi bencana maupun krisis di Indonesia, NGO-NGO tersebut akan datang ke Indonesia untuk memberikan bantuan. Begitu juga sebaliknya. 100 Selain membentuk jaringan dengan berbagai mitra di berbagai negara, ACT Indonesia juga membangun kantor representatif di Turki dan juga akan membukan kantor representative di Doha, Qatar yang merupakan respon dari Qatar mengenai

audiensi yang dilakukan ACT Indonesia pada tahun 2017 lalu tentang kerjasama kemitraan dan juga pembentukan jaringan global ke Qatar.

Kemampuan ACT Indonesia dalam menyalurkan bantuan ini membuktikan bahwa kekuatan jaringan ini lebih besar dari pemerintah Indonesia sendiri. Pemerintah memiliki keterbatasan gerak karena terikat dengan undang-undang maupun perjanjian. Kekuatan itupun juga memungkinkan ACT Indonesia dapat mempengaruhi peinerintah Indonesia walaupun dalam skala yang tidak besar sekalipun. Walaupun gerak ACT Indonesia sering lebih duluan dari pemerintah, hal ini tidak menepis hubungan kerja sama antara ACT Indonesia dan pemerintah Indonesia, karena tetap saja dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan harus mendapat izin dari pemerintah. Hubungan ACT Indonesia dan pemerintah pun tetap dalam keadaan baik dan saling berkoordinasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini berujuan untuk menganalisa bagaimana peran ACT Indonesia dalam memberikan bantuan kepada korban konflik di Suriah. Penelitian ini menggunakan teori *Transnational Activism* dan juga menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network*, teori dan konsep ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ACT Indonesia tidak hanya sebagai penyalur bantuan dan penggalang dukungan saja, tetapi ACT Indonesia merupakan suatu lembaga NGO Internasional yang bisa bergerak secara independen sebgai aktivis dan melakukan advokasi untuk menekan kebijakan dan

juga meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia maupun dunia terhadap keadaan yang sedang terjadi di Suriah.

ACT Indonesia adalah lembaga kemanusiaan lokal yang bertransformasi menjadi lembaga kemanusiaan global dikarenakan melihat begitu banyaknya konflik dan peperangan yang terjadi yang menyebabkan krisis kemanusiaan di dunia. ACT Indonesia menunjukkan dirinya sebagai aktor gerakan sosial transnasional dari berbagai aksi dan bantuan yang mereka lakukan untuk Suriah secara independen. ACT memberikan bantuan kepada korban konflik di Suriah dalam berbagai sektor yang diperlukan, seperti ekonomi, pangan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya.

ACT dalam melakukan misi dan perannya sebagai aktor internasional, melakukan berbagai aksi dan negosiasi dengan cara menggalang dukungan di berbagai kanal informasi salah satunya di media sosial dan forum internasional. Setelah itu ACT membuat program-program yang terdiri dalam berbagai sektor yang dibutuhkan bagi korban konflik Suriah.

ACT dalam merealisasikan bantuan dan menjalankan misinya di Suriah tidak sendiri. Kondisi di Suriah yang menjadi lahan konflik membuat ACT harus bekerjasama dengan mitra kerelawanan di daerah setempat dengan cara membentuk jaringan-jaringan internasional bersama NGO dan relawan lokal yang ada. Jaringan ini membuat ACT memiliki jalur-jalur khusus yang tidak dimiliki pemerintah

atau aktor negara sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan.

ACT bergerak sebagai agen advokasi. ACT Indonesia aktif berdialog dengan pemerintah Indonesia, salah satunya dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Indonesia juga banyak diuntungkan dengan kehadiran ACT, seperti ketika pemerintah Indonesia belum mengalokasikan dana khusus bantuan kemanusiaan sehingga berdampak pada keterbatasan dana, ACT pun mengambil peran dalam membantu penggalangan dana. Terlebih lagi, ACT dapat kepercayaan dari masyarakat di banding ke pemerintah karena adanya transparansi dana. Munculnya ACT dan aktifnya ACT diberbagai wilayah krisis kemanusiaan di dunia, secara tidak langsung juga sangat menguntungkan pemerintah Indonesia, karena ACT bisa dikatakan sebagai representatif negara Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan. ACT juga turut mengharumkan dan menaikkan nama Indonesia di kalangan dunia karena ACT selalu membawa nama Indonesia kemanapun bantuan yang mereka distribusikan.

Kehadiran ACT Indonesia di Suriah cukup memberikan pengaruh bagi warga yang terkena dampak dari konflik Suriah. Dilihat dari segi psikologis, ekonomi, kebutuhan pangan, dan sosial budaya. ACT Indonesia yang hanya sebagai NGO, membuat gerak ACT Indonesia juga sedikit susah untuk bertindak lebih jauh. ACT Indonesia hanya bisa memasukkan bantuan, menggalang dukungan dan mengadvokasikan isu-isu kemanusiaan yang terjadi di Suriah. Kegiatan ACT Indonesia dalam

menggalang dukungan meningkatkan partisipasi masyarakat dan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat membuat bantuan semakin banyak dan dapat meringankan beban korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barrow, O. & Jennings M. (eds). 2001. *The Charitable Impulse: NGOs and Carlsnaes*, Walter, 2013. *Handbook of international relation*. London: SAGE publications Cornell University Press.

Dugis, Vinsensio, 2016, teori hubungan internasional Perspektif-perspektif Klasik, Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).

Hague, R.& Harrop, M. (Eds), 2004. *Comparative Politics and Government*. Internasional: Dari Realism hingga Konstruktivisme. New York: Palgrave Macmillan.

Jonsson, Christer & Martin Hall. 2005. *The Essence of Diplomacy*. London: Department of Political Science, Lund University.

Kartono, Kartini, 1998, *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni Bandung.

Kusumaningrum, Demeiati Nur & Dyah Estu Kurniawati 2016, "Intermestik Limits of Apolitical Derlopment". New York: St. Martin's Press and Houndmills Macmillan Press

Keck, Margaret E. and Sikkink, Kathryn, 2014, *Activist Beyond Borders: Advocacy Network in*

International Politics, Ithaca/London: Cornell University Press.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

A. Muchaddam, Fahham, A.M Kartaatmaja "Konflik Suriah : akar masalah dan dampaknya" Vol 5, No.1 tahun 2014, hlm 37-60

Ali Sarihan, "Is the Arab Spring in the Third Wave of Democratization? The Case of Syria and Egypt, Turkish Journal of Politics", Vol. 3 No. 1 tahun 2012, hlm. 68

Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62.

Baharuddin, Mudori Syarif, Safitri Nurlaila "Dinamika Perang Suriah: Aktor dan Kepentingan" Vol. 2, tahun 2019, Hlm 68-94

David.w.Muriuki. (2005). Contribution of NGOs in Complex Emergencies.

Donelli, F. (2017). Features , Aims and Limits of Turkey 's Humanitarian Diplomacy,(3), 59-83.

Website

Awal Mula Konflik Suriah, diakses dari <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-awal-mula-konflik-suriah-bagaimana-konflik-panjang-dan-berdarah-bisa-terjadi/pada tanggal 26 Februari 2020>.

ID Tesis, Pengertian dan jenis metode deskriptif, dari <https://idtesis.com/metode->

deskriptif/ (diakses pada 3 Mei 2020)

Keberangkatan tim ACT diakses dari [www./14/05/30/n6e88w-malam-ini-act-berangkatkan-tim-kemanusiaan-ke-afrika](http://www.liputan6.com/news/read/3189190/sukarno-cerita-anti-israel-dan-perjuangan-kemerdekaan-palestina) Agustus 6, 2018, dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/3189190/sukarno-cerita-anti-israel-dan-perjuangan-kemerdekaan-palestina>

Konflik Suriah: Siapa yang menagmbil keuntungan?, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50515089> pada tanggal 26 Februari 2020.

Lets Help Syria, diakses dari <https://act.id/suriah/> pada tanggal 26 Februari 2020.

Mudjia Rahardjo, Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif, dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>, (diakses pada 19 juli 2018)

Musabab Perang Suriah, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43403254> pada tanggal 26 Februari 2020.

Nugroho, P. (2018, Januari 19). Di Balik Layar TVC Kapal Kemanusiaan Palestina: Bercurah Keberkahan di Sunda Kelapa. Dipetik Maret 18, 2018, dari ACT: <https://act.id/news/detail/di-balik-layar-tvc-kapal-kemanusiaan-palestina-bercurah-keberkahan-di->

O'Hagan, J. (2017, Januari 25). The Challenge of Humanitarian Diplomacy. Dipetik Juli 12, 2018, dari Australian Institute of International Affairs: <http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-challenge-of-humanitarian-diplomacy/>

PBB: 94ribu, diakses dari <https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/11/8/819243/pbb-94-ribu-orang-suriah-pulang/> pada tanggal 26 Februari 2020

Pengertian Konflik, faktor dan Bentuk lengkap. Diakses dari <http://dosensosiologi.com/pengertian-konflik-faktor-dan-bentuknya-lengkap/> pada 25 Februari 2020.